

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi merupakan sebuah kegiatan utama yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keselamatan menjadi salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menjamin terlaksananya keselamatan yaitu Inpres nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Dalam program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang terdapat pada Inpres nomor 4 tahun 2013 ini terdiri atas 5 pilar, yaitu Pilar I Manajemen Keselamatan Jalan, bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategis keselamatan jalan pada level nasional, instansi yang bertanggung jawab pada pilar ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pilar II Jalan Yang Berkeselamatan, bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi, dan operasional jalan, instansi yang bertanggung jawab pada pilar ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pilar III Kendaraan Yang Berkeselamatan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar

keselamatan yang tinggi, instansi yang bertanggung jawab pada pilar ini adalah Kementerian Perhubungan. Pilar IV Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan, bertanggung jawab untuk meningkatkan perilaku pengguna jalan mengembangkan program yang komprehensif berupa peningkatan penegakan hukum dan pendidikan, instansi yang bertanggung jawab pada pilar ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Pilar V Penanganan Korban Pasca Kecelakaan, bertanggung jawab untuk meningkatkan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan terkait, instansi yang bertanggung jawab pada pilar ini adalah Kementerian Kesehatan ( Inpres Nomor 4 Tahun 2013).

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Kota Tegal. Terdapat 3 program studi yang ada di PKTJ, yaitu Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, Diploma IV Teknik Keselamatan Transportasi Jalan, dan Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari masing-masing program studi, para taruna-taruni melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP). Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan suatu kegiatan praktek lapangan yang dilaksanakan diluar kampus PKTJ. Program kegiatan ini diadakan dalam rangka memberi kesempatan kepada para taruna-taruni untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja secara nyata dan pengalaman ilmu lainnya, dan diharapkan setelah lulus taruna dapat terjun langsung ke dunia kerja. Kegiatan ini merupakan kewajiban dari pembelajaran yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) karena merupakan pendidikan vokasi yang berbasis pada keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan dunia kerja nyata.

Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kurikulum akademik yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), yang diharapkan dapat mengenal lebih jauh dunia kerja, dan dapat dijadikan dasar penyusunan tugas akhir, serta dapat menilai kinerja keselamatan lalu lintas sesuai dengan

5 pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) khusus untuk program studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.

Penilaian kinerja keselamatan jalan yang berdasarkan RUNK, dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang menjadi salah satu alternatif tempat wisata religi di Jawa Tengah. Selain itu juga, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kabupaten produsen rokok di Pulau Jawa. Dengan demikian aktifitas transportasi pariwisata maupun transportasi logistik di Kabupaten Kudus sangat ramai, sehingga muncul permasalahan transportasi yang kompleks di Kabupaten Kudus. Maka dari itu Tim Praktek Kerja Profesi Kabupaten Kudus akan melakukan pengkajian dan analisis terhadap permasalahan yang ada terutama yang bersangkutan dengan keselamatan transportasi. Hasil penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini dapat menggambarkan kondisi lalu lintas yang dilihat dari aspek keselamatan dan dapat dijadikan pedoman bagi daerah terkait perencanaan perbaikan dan pembangunan dalam bidang keselamatan transportasi jalan. Selain untuk mengetahui Kinerja Penyelenggaraan Keselamatan Jalan di Kota Malang, PKP ini juga bertujuan untuk menganalisis lokasi rawan kecelakaan dan juga memberikan rekomendasi yang tepat untuk penanganan lokasi tersebut yang terangkum dalam "BUKU KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI KABUPATEN KUDUS"

## **B. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan buku kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan di Kabupaten Kudus.
3. Memberikan usulan-usulan program penanganan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan untuk meningkatkan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Kudus

4. Mengetahui penyelenggaraan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di Kabupaten Kudus dan mengusulkan program penanganan di Kabupaten Kudus

### **C. Manfaat**

Penulisan buku kinerja keselamatan ini bermanfaat untuk:

1. Tersusunnya buku kinerja keselamatan di Kabupaten Kudus.
2. Bagi Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya

Memberikan informasi mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) kepada instansi yang terkait dalam penyusunan buku kinerja keselamatan Kabupaten Kudus serta sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas sebagai upaya pencegahan atau penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka keselamatan lalu lintas.

5. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Hasil dari PKP ini dapat bermanfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk memperoleh informasi mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang ada di Kabupaten Kudus serta dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam penyusunan panduan Praktek Kerja Profesi di tahun berikutnya.

6. Bagi masyarakat

Khususnya masyarakat Kabupaten Kudus dapat mengetahui kinerja keselamatan yang ada di Kabupaten Kudus.

7. Bagi Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah diperoleh di kampus terkait keselamatan lalu lintas dan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas (RUNK).

### **D. Ruang Lingkup**

Dalam Pembuatan buku kinerja ini terdapat batasan masalah yang akan dibahas:

1. Penyusunan Buku Kinerja Keselamatan dilaksanakan di Kabupaten Kudus
2. Isi dari buku kinerja tersebut meliputi kinerja penyelenggaraan RUNK, analisis keselamatan jalan, dan penanganan daerah rawan kecelakaan
3. Kinerja penyelenggaraan RUNK berisi analisis deskriptif terhadap 5 pilar RUNK
4. Analisis keselamatan jalan meliputi indeks fatalitas, analisis kejadian kecelakaan, identifikasi DRK, perangkingan DRK
5. Penanganan daerah rawan kecelakaan diambil dari 3 peringkat tertinggi berdasarkan perangkingan daerah rawan kecelakaan

#### **E. Sistematika Penulisan Laporan**

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan yang mencakup penjelasan singkat mengenai struktur dari seluruh bab dalam laporan ini.

##### **BAB II: GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan lokasi pelaksanaan praktik ,metode pelaksanaan dan pengumpulan data.

##### **BAB III: KINERJA PENYELENGGRAAN RUNK**

Pada bab ini menjelaskan tentang penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lima pilar RUNK Jalan yang meliputi manajemen keselamatan transportasi jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, penanganan korban pasca kecelakaan dan pembahasan

#### **BAB IV: ANALISIS KESELAMATAN JALAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Indeks fatalitas, analisis kejadian kecelakaan, identifikasi daerah rawan kecelakaan / daerah potensi kecelakaan dan perangkaan daerah rawan kecelakaan / daerah potensi kecelakaan.

#### **BAB V: PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi-lokasi ruas jalan yang merupakan daerah rawan kecelakaan

#### **BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.